

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan hak narapidana berupa remisi di Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan klas II A padang bisa dikatakan telah berjalan dengan lancar, hampir semua narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi disetujui permohonannya selama narapidana tersebut sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan dan berkelakuan baik.
2. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi adalah narapidana itu sendiri, dimana masih kurangnya kesadaran didalam diri narapidana tersebut untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan seperti, berkelahi, melawan petugas, menyelundupkan narkoba, berusaha melarikan diri, dan tindakan-tindakan lain yang mengganggu proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Kendala lainnya adalah masih rancunya sitem dalam menginput data mengenai remisi tersebut dimana pada tahun 2016 telah

terjadi pergeseran dari sistem input data manual ke input data online dimana yang biasanya remisi tersebut di hitung secara manual dan sekarang telah memiliki aplikasi tersendiri namun aplikasi yang mendukung untuk remisi tersebut belum disempurnakan sehingga masih menyebabkan petugas lembaga pemasyarakatan kesusahan dalam merekapitulasi data remisi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di tarik dari hasil analisis data, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar meningkatkan kerja sama yang baik antara petugas yang bertanggung jawab dalam pengklasifikasian dan penilaian pemberian hak remisi terhadap narapidana dalam pelaksanaan pemberian remisi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembinaan narapidana sehingga narapidana dapat menjaga sikap dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dan mendapatkan haknya dan agar narapidana lebih bermutu apabila ia telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan kerjasama antara setiap petugas LAPAS yang bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana.
3. Agar meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan meningkat kembali sarana dan prasarana sistem operasional aplikasi

dalam menginput data remisi agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi.

